

## Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Pencapaian SDGs di Indonesia

***Eko Sulisty***

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi  
Kantor Staf Presiden

Pidato Politik

"Peran Universitas dan Pemerintah Daerah  
dalam Pencapaian SDGs di Indonesia"

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), 4 Oktober 2016,  
di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah berjalan satu tahun sejak dicanangkan. Dalam Sidang PBB ke 71 bulan September 2016 yang lalu, semua negara anggota PBB melaporkan kemajuan pelaksanaan SDGs, termasuk Indonesia;
2. Kemajuan pelaksanaan SDGs di Indonesia mencakup dua hal: (a) komitmen Presiden untuk memimpin langsung pelaksanaan SDGs dengan menyiapkan Peraturan Presiden; (b) memastikan partisipasi publik: CSOs, akademisi, pelaku usaha, filantropi menjadi aktor utama dalam pelaksanaan SDGs sebagai pelaksanaan prinsip ***no one left behind*** dalam SDGs;
3. Perpres Pelaksanaan Pencapaian TPB saat ini sudah mencapai tahap final dan akan segera ditandatangani Presiden;
4. Perpres mengatur pembentukan Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan Pencapaian TPB yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Dewan Pakar dan Kelompok Kerja.
5. CSOs, akademisi, pelaku usaha dan filantropi bersama sama dengan Pemerintah, terlibat sebagai Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Tim Nasional Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan Tim Pengarah terdiri dari Menteri terkait dan diketuai oleh Menteri PPN/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dalam pencapaian TPB di Indonesia dan menyampaikan laporan pencapaian TPB kepada Presiden.

7. Tim Pelaksana bertugas membantu Tim Pengarah dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB.
8. Perpres juga menjamin peran aktif publik dalam pelaksanaan SDGs di tingkat Propinsi serta Kabuptan/Kota.
9. Sesuai dengan Nawacita, partisipasi publik dalam Pemerintahan Jokowi-JK adalah **kunci**. Penyusunan Perpres Pelaksanaan Pencapaian TPB menunjukkan hal ini.
10. Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh para akademisi melalui Universitas dan Lembaga-Lembaga yang dinaunginya dapat mendorong tumbuhnya inovasi dan pembelajaran dalam pelaksanaan TPB. Upaya-paya tersebut sepatutnya didukung oleh pendanaan dari filantropi dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan para BUMN.
11. Kolaborasi strategis di atas tersebut dapat menjadi modal bersama. Maksudnya, kerja sama antar aktor pemerintah dan non-pemerintah bukan hanya untuk suksesnya tercapainya TPB dalam target-targetnya tetapi juga mendorong terwujudnya poros pertumbuhan baru di masing-masing daerah berdasarkan riset, kajian, inovasi dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.